UNAIR
Excellence with Morality

Komunikasi Kebijakan

Policy communication: from evidence to policy narratives

Ilham Akhsanu Ridlo
Writing for ***ScienceWatchdog.id***
Doctoral student at IfKW, Ludwig-Maximilians-Universität, München
Assistant Professor of Health Policy and Administration
Faculty of Public Health, Universitas Airlangga

Foto: KOMPAS/HADI TJAHJAINDRA
Penerangan Keluarga Berencana, ternyata lebih merasuk melalui kegiatan kesenian, Senin (19/7/1971).



Pengungkapan: gambar dibuat dengan bantuan *image generating ChatGPT 5.2* dengan konsep teoritis yang disusun penulis.

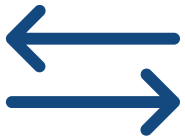
Saya akan menyampaikan..

1. Konsep & Fungsi Komunikasi Kebijakan
2. Tantangan Utama Komunikasi Kebijakan
3. Lanskap Kebijakan & Sasaran Audiens
4. Strategi Komunikasi Kebijakan
5. Narasi Kebijakan dengan *Storytelling*

1

Konsep & Fungsi Komunikasi Kebijakan

Apa itu Komunikasi Kebijakan

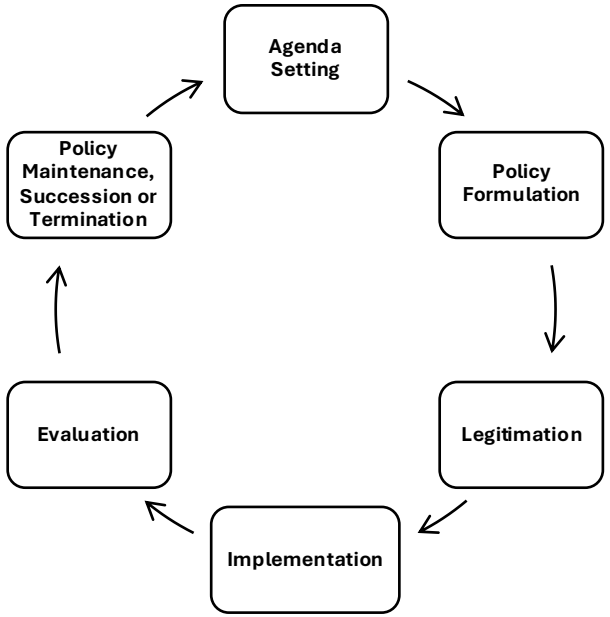


Komunikasi kebijakan adalah praktik komunikasi strategis dan berkelanjutan[1] untuk menerjemahkan bukti ilmiah, analisis, dan pertimbangan nilai[2] ke dalam bentuk pengetahuan yang relevan, dapat dipahami[3,4], dan dapat digunakan oleh aktor kebijakan dalam konteks institusional dan politik, guna mendukung proses pengambilan keputusan dalam ruang lingkup kebijakan publik.

Refleksi penulis dari referensi:

1. Caimey, P. (2016). *The politics of evidence-based policy making*. Palgrave Macmillan.
2. Parkhurst, J. (2017). *The politics of evidence: From evidence-based policy to the good governance of evidence*. Routledge.
3. Jasanoff, S. (2004). *States of knowledge: The co-production of science and social order*. Routledge.
4. Jasanoff, S. S. (1987). Contested Boundaries in Policy-Relevant Science. *Social Studies of Science*, *17*(2), 195-230. https://doi.org/10.1177/030631287017002001 (Original work published 1987)

Komunikasi Kebijakan Bukan Sekedar..



Gambar 1. Siklus Kebijakan Generik[5]

1. Diseminasi hasil riset;
2. Ringkasan akademik;
3. Advokasi normatif

Tapi sebuah proses di mana informasi dipertukarkan dengan tujuan untuk mempengaruhi cara kebijakan publik dipahami, dirancang, atau diimplementasikan melalui siklus kebijakan (*policy cycle*).

5. Cairney, P. (2012). Understanding public policy. Basingstoke: Palgrave.

Komunikasi Kebijakan, Bukan Komunikasi Politik



- Seringkali diartikan dengan kemiripan baik terminologi maupun kedekatan kajian.
- Karena kajian awal muncul dari komunikasi politik[6] sehingga punya kedekatan dalam praktik dan kedalaman literatur.
- Walaupun komunikasi kebijakan punya implikasi dan konotasi politik, komunikasi kebijakan dikaitkan pada diskusi tentang kebijakan publik (*public policy*).
- Ada perbedaan cara dalam penggunaan bukti (*evidence*) dan pemahaman ketidakpastian (*uncertainty*) dalam bukti ilmiah jika dikaitkan dengan *evidence-based policy making*

6. Baca buku “An introduction to political communication” yang ditulis oleh Brian McNair (2017) terbitan Routledge, London https://doi.org/10.4324/9781315750293

Perbedaan Komunikasi Kebijakan dengan Komunikasi Politik..

Komunikasi Politik

- **Proses penyampaian pesan** yang bertujuan memengaruhi kekuasaan politik, opini publik, dukungan elektoral, legitimasi politik, posisi ideologis.
- Beroperasi di arena kompetisi kekuasaan, dan secara inheren bersifat *persuasive* dan *normative*



Komunikasi Kebijakan

- **Proses pertukaran informasi** yang bertujuan memengaruhi bagaimana kebijakan publik dipahami, dirancang, dan diimplementasikan.
- Fokusnya bukan perebutan kekuasaan, tetapi pada: **interpretasi masalah kebijakan, penggunaan bukti, pilihan kebijakan dan konsekuensinya**



Fungsi Utama Komunikasi Kebijakan

1. ***Sense-making***
   Mengurangi kompleksitas tanpa menghilangkan makna substantif.
2. **Relevansi keputusan**
   Menghubungkan bukti dengan mandat kebijakan, risiko, dan konsekuensi nyata.
3. **Legitimasi dan kredibilitas**
   Menunjukkan bahwa bukti dihasilkan dan disajikan secara dapat dipercaya.
4. **Orientasi tindakan**
   Mengubah temuan riset menjadi opsi kebijakan dan implikasi implementasi.
5. **Penghubung sistem pengetahuan dan sistem kebijakan**
   Menyesuaikan bahasa, format, dan waktu dengan logika kebijakan.

2

Tantangan Utama Komunikasi Kebijakan

Tantangan Dalam Komunikasi Kebijakan

Di era *'digital-performative',* perhatian (atensi) adalah sumber daya yang paling langka. Pembuat kebijakan beroperasi dalam kondisi:

1. waktu yang sangat terbatas
2. informasi yang berlebihan
3. tekanan politik dan media yang simultan
4. agenda kebijakan yang terus berubah

Akibatnya, sebagian besar informasi kebijakan tidak pernah benar-benar diproses, bahkan sebelum dinilai kualitas atau relevansinya.



"Komunikasi kebijakan yang dibuat harus mampu merebut dan mempertahankan perhatian interpretatif, bukan sekadar tersedia sebagai dokumen".

Tantangan 1: “Pertarungan” Menarik dan Mempertahankan Perhatian

Pembuat kebijakan sering memindai dokumen dengan cepat. Karena itu, titik masuk utama yang mengikat isu dengan mandat atau risiko.

Komunikasi kebijakan adalah pertempuran konstan untuk perhatian dalam lingkungan yang **penuh informasi**, **audiensnya sibuk** dan **rentang perhatiannya pendek.**



Foto: Istimewa



Perihal atensi, komunikasi kebijakan menghadapi
dua masalah yang berbeda tetapi saling terkait.

A. Mendapatkan perhatian (*attention capture*)

Ini adalah tahap awal ketika aktor kebijakan memutuskan:

1.apakah suatu pesan layak dibuka
2.apakah isu tersebut relevan dengan mandatnya

Keputusan ini sering dibuat dalam hitungan detik, berdasarkan: judul, ringkasan awal, sumber pengirim, waktu penyampaian. Jika gagal di tahap ini, pesan kebijakan berhenti total.

B. Mempertahankan perhatian (*attention retention*)

Jika pesan dibuka, tantangan berikutnya adalah:

1. menjaga fokus pembaca
2. memastikan pesan kunci dipahami dan diingat

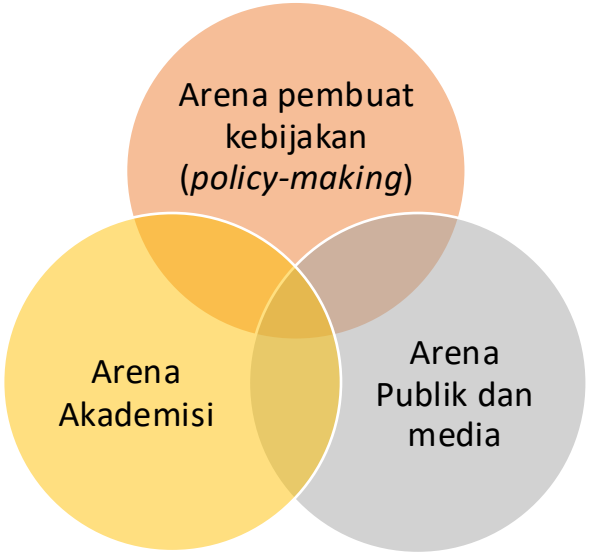
Pada tahap ini, risiko utamanya Adalah kelebihan detail, bahasa teknis dan struktur yang tidak berorientasi Keputusan. Banyak media komunikasi kebijakan (termasuk policy brief) dibaca sebagian, lalu ditinggalkan tanpa menghasilkan dampak.

Tantangan 2: Riset Dalam Pusaran Persaingan

Bukti kebijakan bersaing dengan produk pengetahuan lain seperti memo internal, laporan lembaga pemikir, advokasi, dan framing media.

Dalam arena ini, kebijakan tidak digerakkan oleh bukti ilmiah saja. Bukti ilmiah harus bersaing di dalam jaringan aktor, institusi, dan ide.

Tantangan bagi para peneliti adalah memastikan posisi mereka dipertimbangkan sedini mungkin dalam proses pembuatan kebijakan dan mempertimbangkan semua faktor - dan keterbatasannya - yang memengaruhi para pembuat kebijakan.



"Usaha untuk memengaruhi kebijakan tidak memiliki resep tunggal. Praktik yang sering dibahas meliputi ***hubungan, relevansi, dan kolaborasi, dengan pertukaran dan konsekuensi yang harus dikelola."***

Tantangan 3: Kesenjangan Keterampilan

Dalam konteks tantangan pertama dan kedua yang diidentifikasi di atas, pendekatan baru terhadap komunikasi kebijakan diperlukan agar penelitian dapat terhubung secara efektif dengan kebijakan.

83% masyarakat setuju bahwa para ilmuwan harus mengkomunikasikan temuan mereka kepada publik[7].Di konteks AS, meskipun mayoritas memandang ilmuwan sebagai orang yang cerdas (89%) dan memiliki kepercayaan pada ilmuwan yang bertindak demi kepentingan terbaik publik (76%), hanya 45% yang melihat ilmuwan sebagai komunikator yang baik[8].

Menjadi peneliti yang baik adalah satu hal. Menjadi komunikator yang baik adalah hal lain. Kabar baiknya adalah kami percaya bahwa kedua keterampilan tersebut saling melengkapi.



Gap antara akademisi dan kebijakan muncul diantaranya oleh:

1. Keterbatasan Pelatihan
2. Kurangnya motivasi (*publish or perish; tech or perish; impact or perish*)
3. Takut untuk mengemukaan pendapat ilmiah bagi publik, dan gangguan dampak reputasi akademik
4. Ketakutan untuk masuk pada diskursus public dan digital (Media sosial)

7. Cologna, et all. (2025) melakukan survei di 68 negara terhadap 71.922 responden
8. Survei Pew Research Center pada November 2024 menanyakan kepada warga Amerika tentang persepsi mereka mengenai para ilmuwan dan peran mereka dalam pembuatan kebijakan. Meskipun mayoritas memandang ilmuwan sebagai orang yang cerdas (89%) dan memiliki kepercayaan pada ilmuwan yang bertindak demi kepentingan terbaik publik (76%), hanya 45% yang melihat ilmuwan sebagai komunikator yang baik (Pew Research Center 2024).

3 Lanskap Kebijakan & Sasaran Audiens

Lanskap Kebijakan



Akan sulit untuk berkomunikasi dengan pembuat kebijakan jika kita tidak punya pemahaman yang 'solid' tentang bagaimana kebijakan bekerja. Menjadi ahli pada isu khusus tidak cukup, karena tidak semua pengetahuan akan otomatis bisa ditranlasi menjadi kebijakan.

Sebelum memulai proses strategi komunikasi kebijakan kita perlu tahu:

1. Desain Kebijakan (*Policy Design*)
2. Siklus Kebijakan (*Policy Cycle*)
3. Aktor-aktor Kebijakan (*Policy Actors*)
4. Sejarah dan Konteks Kebijakan (*Policy History/Context*)

Pemetaan Lanskap Kebijakan



Komponen yang perlu dianalisis sebelum menyusun strategi komunikasi kebijakan.

- **Mandat dan yurisdiksi:** Siapa yang punya kewenangan formal.
- **Arena Keputusan:** Kementerian, regulator, parlemen, pemerintah daerah, atau lintas sektor.
- **Jendela kebijakan:** Momentum yang membuat isu menjadi dapat diputus (momentum jeda untuk pertukaran informasi).
- **Kendala implementasi:** Anggaran, kapasitas, resistensi, dan risiko.

Latihan: 1. Memahami Landskap Kebijakan (*policy landscape*)

Komunikasi kebijakan Anda hanya akan berdampak jika Anda memiliki pemahaman yang kuat tentang lanskap kebijakan di bidang kebijakan Anda. Anda dapat menggunakan lembar latihan di bawah ini sebagai ringkasan informasi penting yang harus Anda cari sebelum mulai merancang strategi komunikasi kebijakan Anda.		
1	Desain Kebijakan (Policy Design)	Apa saja tujuan kebijakan dan instrumen kebijakan yang saat ini berlaku? Jika ada usulan baru: apa saja tujuan kebijakan dan instrumen yang dinyatakan di dalamnya? Instrumen regulasi (mengendalikan perilaku public, sanksi hukum), instrument finansial (insentif ekonomi, penganggaran), instrument informatif (Pendidikan, informasi, kampanye), instrument institusional (pembentukan Lembaga pemerintah), instrument administratif (aturan prosedural)
2	Siklus Kebijakan (Policy Cycle) & Aktor Utama (Key Actors)	Apa saja tahapan dalam siklus kebijakan dan lembaga mana yang penting di setiap tahapan? Apakah isu kebijakan Anda saat ini berada dalam siklus kebijakan (dibagian mana)?
3	Sejarah dan Konteks Kebijakan (Policy History)	Bagaimana sejarah dan konteks kebijakan ini dibuat? Bagaimana kebijakan ini berubah di masa lalu? Apa saja penyebab utama perubahan tersebut?
4	Keterkaitan Kebijakan (Policy Linkages)	Bagaimana kebijakan ini terkait dengan kebijakan lainnya? Peraturan apa saja yang terdampak?
5	Contoh Kebijakan (Policy Examples)	Apa ada pendekatan lain untuk masalah kebijakan ini? Adakah contoh kebijakan dari luar negeri yang menangani masalah ini secara berbeda? Bagaimana prosesnya? Apa yang bisa diambil dalam konteks ini?

Segmentasi Audiens Kebijakan

Segmentasi audiens kebijakan adalah proses analitis untuk mengidentifikasi aktor yang relevan dalam proses kebijakan dan menyesuaikan komunikasi dengan peran, level, kepentingan, dan kebutuhan informasi mereka. Audiens kebijakan dapat disegmentasikan berdasarkan:

1	Peran dalam kebijakan	• Pengambil keputusan • Perantara kebijakan (policy intermediaries) • Pelaksana • Kelompok terdampak
2	Level Kebijakan	• Makro • Meso • Mikro
3	Kepentingan dan Posisi	• Pendukung • Penentang • Ambivalen • Belum terpapar isu



Pengungkapan: gambar dibuat dengan bantuan *image generating ChatGPT 5.2* dengan konsep teoritis yang disusun penulis.

4 Strategi Komunikasi Kebijakan yang Terarah

Strategi Komunikasi Kebijakan

Strategi komunikasi kebijakan dipahami bukan sebagai aktivitas tambahan setelah kebijakan dirumuskan, melainkan sebagai komponen integral dari proses kebijakan itu sendiri [9,10].

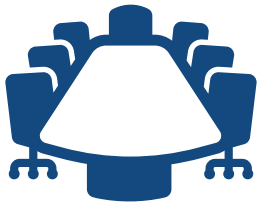
Pendekatan ini berangkat dari kritik terhadap model linear yang mengasumsikan bahwa bukti ilmiah akan secara otomatis mengalir ke dalam pengambilan keputusan jika disampaikan dengan benar [9,11].



"Strategi komunikasi kebijakan merupakan respon terhadap kompleksitas kebijakan. ***Orientasinya pada keputusan yang dihasilkan, bukan diseminasi"***

9. Menurut Cairney, P. (2016) dalam *The politics of evidence-based policy making* terbitan *Palgrave Macmillan*, kebijakan bukan sebuah proses linear, dan dewasa ini ditentukan oleh basis utama perhatian isu, insitusionalisasi dan kemunculan ide. Kritik pada proses translasi bukti dalam penyusunan kebijakan setingkali diakibatkan oleh proses yang sangat teknokratis
10. Kebijakan publik layaknya sains, menurut penulis dapat dilakukan melalui praktik ko-produksi dalam praktik sosial dan komunikatif yang oleh Jasanoff, S. (2004) ditulis dalam bab buku berjudul *States of knowledge: The co-production of science and social order* terbitan Routledge.
11. Bukti ilmiah tidak otomatis dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan ditulis oleh Parkhurst, J. (2017) di buku *The politics of evidence: From evidence-based policy to the good governance of evidence. Routledge.*

Prinsip Strategi Komunikasi Kebijakan



Prinsip 1. Berangkat dari Tujuan Kebijakan, Bukan Produk

Strategi komunikasi kebijakan harus dimulai dengan pertanyaan:

1. Keputusan apa yang ingin dipengaruhi?
2. Pada tahap kebijakan mana intervensi dilakukan?
3. Tanpa kejelasan tujuan, komunikasi berisiko menjadi diseminasi tanpa dampak.

Prinsip 2: Audiens Menentukan Strategi

Strategi komunikasi harus disesuaikan

1. Peran audiens dalam kebijakan
2. Tingkat pengaruh dan kepentingan
3. Keterbatasan waktu dan mandat

Prinsip 3: Relevansi Lebih Penting daripada Kelengkapan

Komunikasi kebijakan tidak bertujuan menyampaikan semua bukti, tetapi:

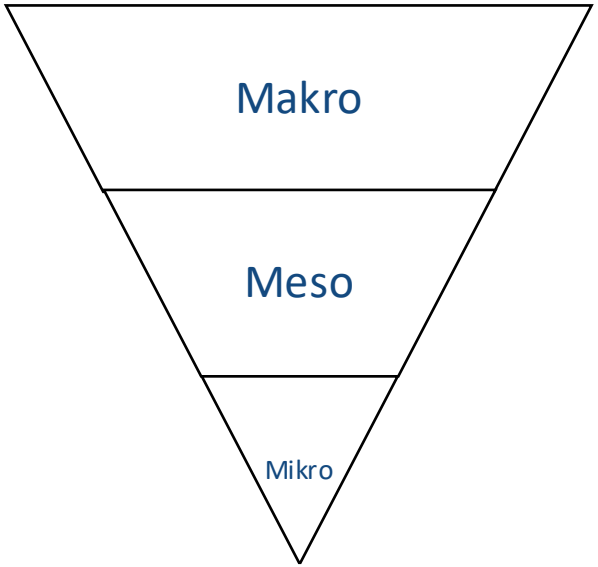
1. Bukti yang paling relevan
2. Pada waktu yang tepat
3. Dalam format yang dapat digunakan

Latihan: 2. Strategi Komunikasi Kebijakan

Strategi komunikasi kebijakan adalah tentang memilih secara sadar apa yang dikomunikasikan, kepada siapa, kapan, dan untuk tujuan kebijakan apa—agar bukti dapat digunakan secara bermakna dalam pengambilan keputusan.

1	Tujuan Kebijakan Secara Keseluruhan	• Apa yang ingin Anda capai secara akhir? • Bagaimana Anda ingin kebijakan berubah?
2	Pemetaan Audiens	• Rincian Audiens Utama/Kunci • Sasaran Audiens (Segmentasi Audiens) • Karakteristik utama dan posisi mereka
3	Pesan Kunci	• Pesan utama untuk setiap audiens • Tantangan yang harus diatasi oleh pesan • Argumentasi yang jelas dan ringkas
4	Tujuan Komunikasi Kebijakan	• Tujuan Output (*Output objectives*) • Tujuan Dampak (*Outcome objective*)
5	Pilihan Alat Dan Kanal	• Jenis Luaran (Types of outputs) – Alat apa yang digunakan? • Bentuk Pesan (Messengers) – Bagaimana format penyampaiannya? • Penjawalan (Timeline) – Kapan digunakan? • Anggaran (Budget)
6	Evaluasi	• Evaluasi tujuan komunikasi

Strategi Terarah di Berbagai Level Kebijakan

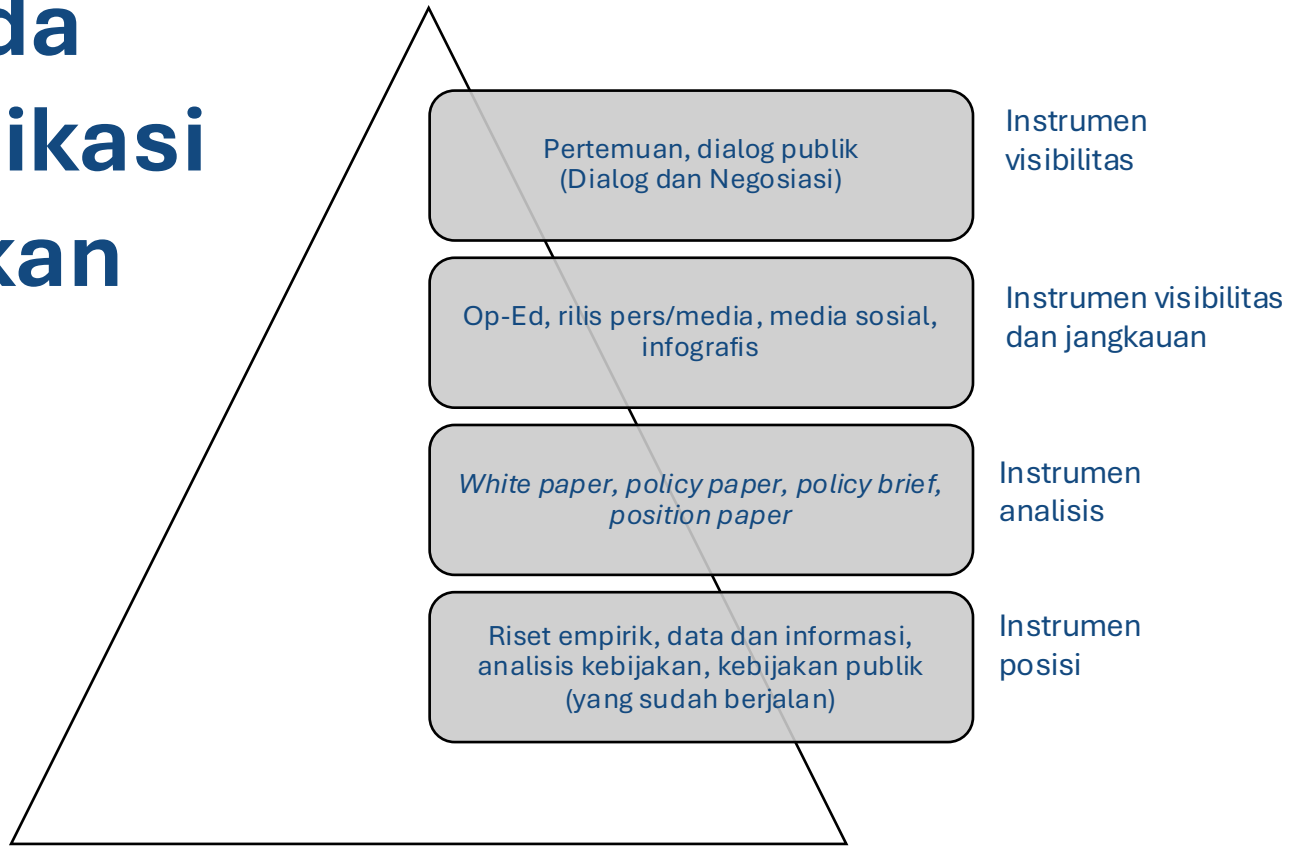


Level Makro: *agenda-setting* dan legitimasi
Strategi: *framing* nilai dan arah kebijakan

Level Meso: formulasi dan negosiasi
Strategi: klarifikasi opsi dan *trade-off*

Level Mikro: implementasi dan kepatuhan
Strategi: kejelasan operasional

Piramida Komunikasi Kebijakan



Toolkit Komunikasi Kebijakan

Policy strategy
Position paper
Policy Brief
Policy Memo

Instrumen Posisi dan Pilihan Kebijakan (Artikulasi posisi kebijakan)

White Paper
Impact assessment
Report
Factsheet

Instrumen Analitis/Alat Persuasi (Landasan Kebijakan)

Op-Ed
Press Release
Media Statement
Ad Banner

Instrumen Media/Relasi public (Visibilitas dan framing)

Website
Social Media engagement
Speech/Presentation
Video/Podcast
Infographic
Newsletter

Instrumen Digital/Multiplatform (Jangkauan dan penguatan pesan)

Email/Letter
Event
Meeting
Lobbying

Instrumen Dialog dan Interaksi Kebijakan (Pertukaraan dan Negosiasi)

Kesalahan Umum dalam Strategi Komunikasi Kebijakan



1. Menyamakan strategi dengan kampanye “media sosial”
2. Menghasilkan banyak luaran (medium) tanpa tujuan jelas
3. Mengabaikan konteks politik dan institusional
4. Berusaha menjangkau semua audiens sekaligus
5. Mengukur dampak hanya dari visibilitas

5 Merancang Narasi Kebijakan dengan *Storytelling*



Mengapa Narasi Penting Dalam Komunikasi Kebijakan?

Kebijakan publik bersifat abstrak dan teknis. Narasi berfungsi sebagai mekanisme kognitif dan komunikatif untuk menghubungkan data, aktor, dan dampak kebijakan ke dalam alur yang bermakna bagi audiens.

Mengapa Storytelling?

1. Untuk berkomunikasi secara efektif dalam kebijakan publik (dan di luar itu), seseorang harus menyadari pentingnya bercerita.
2. Manusia memahami dunia sekitarnya mereka melalui cerita (*story*).
3. Kita mencari dan mendambakan cerita setiap hari sebagai sumber inspirasi dan hiburan, dan kita berkomunikasi serta mengenal orang lain melalui cerita mereka.

Manusia dalam keseharian telah mengembangkan narasi keseharian dalam anggota Masyarakat (Stapleton & Wilson 2018), baik itu komunitas budaya, komunitas etnis, komunitas penggemar tim sepak bola tertentu, atau komunitas pembuat kebijakan.

Sebagai manusia, otak kita dirancang untuk cerita (Cron, 2012). Memang, mengingat pentingnya cerita atau narasi dalam komunikasi manusia dan pembangunan komunitas, akan mengejutkan jika cerita (*story*) tidak memiliki peran penting dalam kebijakan publik.



Cerita (Story) mempunyai peran penting komunikasi kebijakan, dengan membuatnya:

1. **Lebih mudah dipahami**
2. **Lebih mudah diingat**
3. **Lebih berdampak**

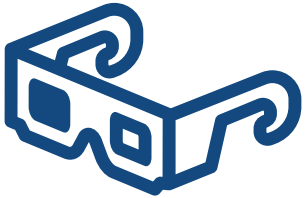
Teknik bercerita (*storytelling*) dalam perumusan komunikasi kebijakan di publik dapat dilakukan, namun dengan beberapa adaptasi, penyesuaian dalam beragam format.

Delivery	Contoh Luaran	Tepat digunakan untuk…
Narasi tertulis (*written narrative*)	Ringkasan kebijakan (*policy brief); opini; policy report; explainers*	Sejarah dan konteks kebijakan, latar belakang isu, penjelasan isu kompleks, fakta-fakta biografis
Narasi verbal (*verbal narrative*)	Temu analisis kebijakan, pernyataan media (rilis pers), seminar, presentasi	Mendukung pesan kunci yang kuat, cerita pribadi, contoh, dan anekdot, cerita inspiratif
Infografis (*infographics*)	*Timeline infographics, data infographics, process infographics, comparison infographics*	*Timeline, data storytelling*, proses kompleks (*complex processes*), *direct comparison*
Single/carousel images	Unggahan media sosial, foto bercerita, gambar dengan narasi tertulis.	Menangkap momen atau emosi, karakter atau tempat yang khas yang punya konteks kuat dalam bingkai kebijakan
Video	Unggahan media sosial pendek (seperti *reels*), dokumenter, *explainer videos*	Aksi, movement, personality, kharisma, karakter dan konteks ruang dan waktu dalam bingkai kebijakan
Audio	*Podcast*, siaran melalui gelombang radio komunitas/lokal	Menangkap emosi, cerita personal, narasi untuk isu yang butuh penjelasan panjang, untuk mengatur ‘mood’ audiens untuk menyimak isu lebih emosional, memotret peristiwa dengan karakteristik khusus (memo, testimoni kebijakan)





Sumber: https://www.epi.org/publication/minimum-wage-state-solutions-to-the-u-s-worker-rights-crisis/



Berdasarkan *Narrative Policy framework* (NPF) (Jones and mcBeth 2010; Crow and Jones, 2018) yang dikembangkan dari teori *'interpretivist'approach'* ada beberapa elemen cerita yang mempermudah komunikasi kebijakan, yaitu:

1. **Latar tempat (*the setting*) :**
   konteks dimana cerita berlangsung, bagaimana suasana umum yang berkembang, opini publik, tantangan yang dihadapi publik
2. **Tokoh/ aktor yang terlibat (*the character*) :**
   bagaimana peran, kategori, aktor dan tokoh dalam isu kebijakan, penggambaran tokoh dalam kacamata audiens
3. **Alur cerita (*the plot*):**
   apa yang terjadi dalam cerita kebijakan, dan mengapa hal itu terjadi seperti itu. Momentum apa saja yang terjadi (titik balik) dan motif.
4. **Pesan moral dari cerita (*the moral story*):**
   ini mencakup hasil kebijakan, solusi kebijakan, seruan untuk bertindak, saran untuk pembuat kebijakan atau audiens.

“When the government is barely functional, the people get really creative to survive”

Terimakasih



About me?

Researcher in science communication and public health. Focusing on science journalism, health policy, and the circulation of evidence in media and policy arenas. My work examines how authority, credibility, and trust are negotiated with an empirical focus on Indonesia and broader Global South contexts.

Recent academic works: https://orcid.org/0000-0001-5751-3665
Narrative CVs: https://ilhamridlo.owlstown.net
Contact: ilham@sciencewatchdog.id
Science Blog: https://sciencewatchdog.id